

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penulisan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Black, H. C.. 1990, *Black's Law Dictionary*. West Publishing CO. United States of America.
- Djojodiguno, M.M.. 1950. *Menjandra Hukum Adat*. Jajasan Fonds Universitit Negeri Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Dmitriev, Sviatoslav. 2015. *Herodotus, Isonomia and The Origin Of Greek Democracy*. New Press Edizioni. Yunani.
- Hadikusuma, Hilman. 1979. *Hukum Pidana Adat*. Alumni. Bandung.
- _____. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (edisi revisi)*. Manda Maju. Bandung.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penulisan Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humantika. Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S.. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi – Jilid II*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 2014. *Pengantar Antropologi I*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Korn, V.E. terjemahan Mean Joebaar dan I Nengah Merta. 2017. *Hukum Adat Bali (Het Adatrecht Van Bali)*. Udayana University Press. Denpasar.
- Nurcholis, H.. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI- Press. Jakarta.
- Soepomo, R.. 1979. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Sudantra, I Ketut. 2016. *Pengakuan Peradilan Adat (Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman)*. Swasta Nulus. Denpasar

Sudharta, Tjok Rai dan Ida Bagus Oka Punia Atmaja. 2010. *Upadesa Tentang Ajaran-Ajaran Agama Hindu*. Paramita. Surabaya.

Ter Haar diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto. 1987. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht)*. PT.Pradnya Paramita. Jakarta.

Windia, Wayan P. dan I Ketut Sudantra. 2016. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Swasta Nulus. Denpasar.

Artikel Jurnal

Benda-Beckmann, Keebet von. "Forum Shopping and Shopping Forums; Dispute Processing in A Minangkabau Village in West Sumatra", *Journal of Legal Pluralism*. Vol. 19. 1981.

Griffiths, John. "What is Legal Pluralism". *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. No. 24. 1986.

Hidayat, Rahmat. "Rasionalitas: Overview Terhadap Pemikiran Dalam 50 Tahun Terakhir". *Buletin Psikologi*. Vol. 24. No.2. Tahun 2016.

Kleinhans, Martha-Merie dan Roderick A. Macdonald. "What is a Critical Legal Pluralism". *Canadian Journal of Law and Society*. Vol. 12. No. 2. 1981.

Sudantra, I Ketut. "Pola Penyelesaian Persoalan-Persoalan Hukum oleh Desa Adat". *Dinamika Kebudayaan*. Vol. III. No. 1. Februari 2001.

Syamsu, Suhardiman. "Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia". *Jurnal Government Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1. No. 1. Juli. 2008.

Tamanaha, Brian Z. "The Folly of the 'Social Scientific' Concept of Legal Pluralism". *Journal of Law and Society*. Vol. 20. No. 2. Summer 1993.

Whytock, Christopher A.. "The Evolving Forum Shopping System". *Cornell Law Review*. Vol. 96. No. 481. Maret. 2011.

Hasil Penelitian

Sudiyat, Iman, Hidjazie Kartawidjaja, Soedarso, Soekanto, Sihono Tjokroradjoso, Marjanto Poerwomartono, Tjipto Hadipranowo, Muh. Munir. 1977. *Masalah Hak Ulayat Di Wilayah Bekas Keresidenan Madura*. hasil penelitian. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Tugas Akhir

Apriyanto MS, Wisnu. 2018. *Jro Balian dan Tantangan Modernisasi dalam Penyutradaraan Film Dokumenter Potret 'Jro Balian'*. Skripsi. Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Yogyakarta.

Heryono Gunawan, Deddi. 2013. *Perubahan Sosial di Perdesaan Bali*. Disertasi. Pasca Sarjana Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.

Wahyuni, Ni Ketut. 2014. *Peran Komunikasi Masyarakat dalam Pemingitan Jro Balian Sebagai Pemuput Yajnya di Pura Ulun Danu Desa Pakraman Batur Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*. Skripsi. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Denpasar.

Makalah/Pidato

Arizona, Yance. "Masyarakat Adat dan Pembaruan Hukum Daerah". *Pidato*, Seminar Eksistensi Masyarakat Hukum Adat: Antara Realita dan Harapan dalam Konstitusi Sosial Indonesia. Malang. 10 Oktober 2016.

Benda-Beckmann, Frans von. "Changing Legal Pluralism in Indonesia". *Pidato*. 6th International Symposium Commission on Folk Law and Legal Pluralism. Ottawa. 1990.

Bedner, Adrian W. "The Context of Law". *Pidato*. International Congress of the Commission on Folk Law and Legal Pluralism: Legal Pluralism and Unofficial Law in Social, Economic and Political Development. ChiangMai. April, 2002.

Nurjaya, I Nyoman. "Memahami Potensi dan Kedudukan Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional". *Pidato*. Seminar Hukum Adat dan Politik Hukum Nasional. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. 20 Agustus 2008.

Sasmitha, Tody. "Masyarakat Hukum Adat: Persekutuan Hukum (Rechtsgemeenschappen) atau Subjek Hukum". *Makalah*. Simposium Nasional Masyarakat Hukum Adat II di Universitas Pancasila. Jakarta. 16-17 Mei 2016.

Woodman, Gordon. "Historical Development, Introduction to contemporary Legal Pluralism in a World Wide Perspective, Historical Development". *Pemateri*. A Post-Congress 'Folk Law and State Law Today and Tomorrow'. Faculty of Law, Victoria University. Wellington. 1992.

Artikel dalm Antologi

Bedner, Adrian W. *“Shopping Forums: Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia”*. dalam Adrian W. Bedner, Sulistyowati Irianto. *et al.* 2012. *Kajian Sosio-Legal*. Pustaka Larasan. Denpasar.

_____ dan Jacqueline Vel. *“Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses Terhadap Keadilan”*. dalam Adrian W. Bedner, Sulistyowati Irianto, *et al.* 2012. *Kajian Sosio-Legal*. Pustaka Larasan. Denpasar.

Irianto, Sulistyowati. *“Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya”*. dalam Tim HuMa. 2005. *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa). Jakarta.

Simarmata, Rikardo. *“Pluralisme Hukum dalam Diskursus Akademik dan Gerakan Pembaharuan Hukum”*. dalam Tim HuMa. 2005. *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. HuMa. Jakarta.

Artikel Majalah atau Koran

Absir, I Wayan. *“Tanggung Jawab Tradisi”*. *Majalah Batur Edisi 1*. November 2018.

Asta, I Wayan. *“Menoleh Sistem Ulu Apad Batur; Sekilat Tentang “Munggah Makraman” Di Desa Pakraman Batur”*. *Majalah Batur Edisi 1*. November 2018.

Tanpa Nama. *“Jero Balian Digoda, Warga Protes Ke Bupati”*. Bali Post. 26 April 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali No. 3 Tahun 1988 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2019 tentang Desa Adat.